

## PERAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM DALAM MENDUKUNG KEBERLANGSUNGAN HIDUP SUKU BAJAU

Maghfira Shabrina Potabuga<sup>1</sup>, Imam Fadhil Nugraha<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Hasanuddin

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received

Revised

Accepted

Available online

Korespondensi: Email :

[1potabugamaghfira@gmail.com](mailto:1potabugamaghfira@gmail.com)

[2imamfadhil86@gmail.com](mailto:2imamfadhil86@gmail.com)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas  
Pendidikan Ganesha.

### Abstract

*This study aims to analyze the role of Indonesia as a maritime country in maintaining the survival of the Bajau Tribe in Kaledupa District, Wakatobi Regency. The Bajau Tribe is a community group that depends on maritime resources for their survival, such as fisheries and marine affairs. However, various challenges such as exploitation of natural resources, environmental change, and government policies affect their survival. This study uses a case study approach to evaluate Indonesia's policies and roles in supporting environmental sustainability and fulfilling the rights of the Bajau Tribe. Data were obtained through qualitative methods with in-depth interviews and documentation studies. The results of the study show the importance of a sustainable approach in managing maritime resources and the support of inclusive government policies to ensure the welfare of the*

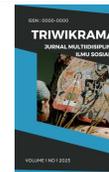
*Bajau Tribe. This study is expected to provide a comprehensive picture of the dynamics of the relationship between maritime countries and indigenous peoples who depend on marine resources.*

**Keywords:** *Indonesia's Role, Maritime Nation, Challenge, Bajau Tribe*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Indonesia sebagai negara maritim dalam menjaga keberlangsungan hidup Suku Bajau di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. Suku Bajau merupakan kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber daya maritim untuk kelangsungan hidup mereka, seperti perikanan dan kelautan. Namun, berbagai tantangan seperti eksploitasi sumber daya alam, perubahan lingkungan, serta kebijakan pemerintah memengaruhi keberlangsungan hidup mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengevaluasi kebijakan dan peran Indonesia dalam mendukung kelestarian lingkungan serta pemenuhan hak-hak Suku Bajau. Data diperoleh melalui metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya maritim serta dukungan kebijakan pemerintah yang inklusif untuk memastikan kesejahteraan Suku Bajau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika hubungan negara maritim dengan masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya laut.

**Kata kunci:** Tantangan, Negara Maritim, Peran Indonesia, Suku Bajau



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

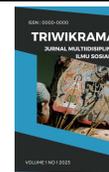
Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki potensi maritim yang signifikan dalam menopang ekonomi, budaya, dan kehidupan masyarakat pesisir. Laut tidak hanya berperan sebagai sumber daya alam yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, tetapi juga membentuk identitas budaya berbagai komunitas pesisir. Salah satu komunitas yang memiliki hubungan erat dengan lingkungan maritim adalah Suku Bajau, yang dikenal sebagai komunitas nomaden dengan keterampilan menyelam dan menangkap ikan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap ekosistem laut. Suku Bajau mengandalkan kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya laut, seperti ikan dan biota laut lainnya, untuk keberlanjutan hidup (Artanto, 2017). Namun, mereka menghadapi ancaman serius akibat degradasi ekosistem laut, eksploitasi berlebihan, dan dampak perubahan iklim. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur publik turut memengaruhi kesejahteraan sosial mereka.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia sejak zaman Hindia Belanda telah merumuskan berbagai kebijakan, termasuk upaya pelestarian lingkungan laut dan pengelolaan permukiman masyarakat pesisir (Clarkson, 1968). Salah satu kebijakan tersebut adalah intervensi pembangunan permukiman yang bertujuan mengurangi pola hidup nomaden dan memberikan akses lebih baik terhadap layanan publik. Kecamatan Kaledupa di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, menjadi salah satu lokasi yang merepresentasikan dinamika ini. Terletak di kawasan Taman Nasional Wakatobi, kecamatan ini menjadi contoh interaksi antara intervensi pemerintah dan kearifan lokal masyarakat Bajau. Berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan, telah diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan tetap muncul, termasuk resistensi masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka dan keterbatasan sumber daya yang menghambat keberlanjutan hidup mereka.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan hidup Suku Bajau, dengan fokus pada Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. Pendekatan yang mengintegrasikan kebijakan pemerintah, aspek lingkungan, dan kearifan lokal diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### B. Studi Literatur

Penelitian ini berupaya memahami peran Indonesia sebagai negara maritim dalam mendukung keberlanjutan hidup Suku Bajau melalui studi kasus Kecamatan Kaledupa di Kabupaten Wakatobi. Kajian literatur difokuskan pada dua sumber utama: *The Life and Culture of the Bajau Sea Gypsies* dan *Intervensi Pemerintah terhadap Suku Bajau melalui Pola Permukiman*. Kedua referensi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai budaya Suku Bajau, tantangan yang mereka hadapi, serta dampak intervensi pemerintah terhadap kehidupan mereka, khususnya di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi.



Kajian pertama, *The Life and Culture of the Bajau Sea Gypsies*, mengungkapkan hubungan erat antara tradisi Suku Bajau dengan ekosistem laut. Sebagai penyelam dan nelayan andal, mereka mengandalkan praktik tradisional dalam memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Namun, perubahan lingkungan yang dipicu oleh eksploitasi sumber daya, degradasi ekosistem, serta perubahan iklim menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan hidup mereka. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan publik memperburuk kesejahteraan sosial mereka (Jeon, 2019).

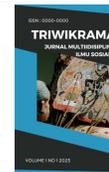
Kajian kedua, *Intervensi Pemerintah terhadap Suku Bajau melalui Pola Permukiman*, menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan mengintegrasikan Suku Bajau ke dalam pola hidup menetap melalui pembangunan permukiman. Studi ini menekankan bahwa intervensi tersebut, meskipun memberikan manfaat berupa akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sering kali berbenturan dengan kearifan lokal masyarakat. Dampak dari intervensi ini meliputi resistensi budaya, perubahan nilai tradisional, serta tantangan adaptasi terhadap lingkungan baru (Widagdo, 2014).

Kecamatan Kaledupa menjadi lokasi yang strategis untuk menganalisis fenomena ini, mengingat posisinya sebagai bagian dari Taman Nasional Wakatobi yang memiliki nilai konservasi tinggi. Program pemerintah, seperti penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan, telah mendukung keberlanjutan hidup masyarakat, tetapi juga memicu perubahan sosial yang kompleks. Pergeseran pola kehidupan tradisional akibat kebijakan permukiman memunculkan tantangan dalam menjaga identitas budaya mereka.

Meskipun literatur sebelumnya sudah memberikan gambaran yang cukup komprehensif, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Kesenjangan ini berfokus pada hubungan antara kebijakan konservasi maritim dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi Suku Bajau. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan mengevaluasi kebijakan maritim Indonesia, menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan Suku Bajau di Kecamatan Kaledupa, serta memahami peran kearifan lokal dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial mereka. Pendekatan yang memadukan kebijakan pemerintah, tantangan lingkungan, dan nilai-nilai budaya tradisional diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk memahami efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan hidup Suku Bajau di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap isu yang kompleks, khususnya terkait interaksi antara kebijakan pemerintah, kearifan lokal, dan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat. Data diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen yang relevan. Beberapa literatur utama yang digunakan adalah *The Life and Culture of the Bajau Sea Gypsies* dan *Intervensi Pemerintah terhadap Suku Bajau melalui Pola Permukiman*, yang memberikan wawasan tentang tradisi Suku Bajau, tantangan yang mereka hadapi, dan dampak kebijakan terhadap kehidupan mereka.



Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam literatur, seperti dampak kebijakan pemerintah terhadap pola hidup tradisional masyarakat, resistensi budaya, serta upaya pelestarian ekosistem laut. Fokus analisis adalah mengevaluasi relevansi kebijakan konservasi maritim terhadap kearifan lokal dan kesejahteraan masyarakat Suku Bajau yang berada di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perumusan kebijakan maritim yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

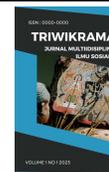
## PEMBAHASAN

### 1. Potensi Maritim Indonesia dan Peran Suku Bajau

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan hayati laut yang sangat melimpah, menjadikannya pusat keanekaragaman laut global. Potensi ini tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi nasional tetapi juga mencerminkan identitas bangsa sebagai negara maritim. Pemerintah Indonesia memegang peran penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya maritim melalui berbagai kebijakan strategis, seperti pelestarian ekosistem laut, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir (Kome et al., 2024). Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa identitas Indonesia sebagai bangsa maritim harus terus dipulihkan dan diperkuat untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia (Humas, 2021). Visi ini menempatkan masyarakat maritim tradisional, seperti Suku Bajau, sebagai bagian penting dari upaya pelestarian dan pengelolaan kekayaan laut.

Suku Bajau, sebagai salah satu komunitas maritim tradisional, memiliki hubungan yang erat dengan laut dan menjadi bagian penting dari potensi maritim Indonesia. Dengan asal-usul dari Semenanjung Melayu, Suku Bajau telah menyebar ke berbagai wilayah maritim Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan menjalani kehidupan yang sangat bergantung pada laut. Mereka berbicara dalam bahasa Sama-Bajau, yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, dan mencari nafkah melalui berbagai aktivitas berbasis kelautan seperti menangkap ikan, berdagang, dan membuat perahu (Jeon, 2019). Kearifan lokal mereka dalam memanfaatkan sumber daya laut mencerminkan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap ekosistem maritim.

Sebagai komunitas yang dikenal dengan gaya hidup nomaden di laut, Suku Bajau sering disebut dengan berbagai istilah seperti *sea nomads* atau *sea gypsies* oleh penulis asing (Koentjaraningrat, 1993). Namun, mereka menyebut diri mereka sebagai "Sama" yang melambangkan rasa persatuan lintas wilayah meskipun mereka tinggal di lautan yang berbeda (Widagdo, 2014). Kehidupan Suku Bajau yang terintegrasi dengan laut menunjukkan peran mereka yang sangat penting dalam menjaga potensi budaya kemaritiman Indonesia. Aktivitas mereka tidak hanya mendukung keberlanjutan ekonomi lokal tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam melestarikan ekosistem laut. Dalam konteks visi maritim nasional, keberadaan Suku Bajau sudah seharusnya menjadi inspirasi bagi pengelolaan laut yang berbasis pada kearifan lokal, selaras dengan upaya pemerintah untuk memulihkan dan memperkuat identitas maritim bangsa.



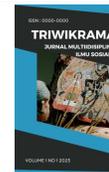
## 2. Tantangan yang dihadapi Suku Bajau di Kecamatan Kaledupa: Taman Nasional Wakatobi

Sebagai komunitas yang sebelumnya hidup nomaden di lautan namun kini menetap di wilayah pesisir, Suku Bajau menghadapi berbagai penyesuaian dan tantangan. Di satu sisi, mereka berupaya mempertahankan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, sementara di sisi lain, mereka harus beradaptasi dengan kehidupan di daratan yang sering kali bertolak belakang dengan prinsip dan tradisi maritim mereka. Perubahan ini semakin dipengaruhi oleh keberadaan kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Wakatobi, yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7661/KPTS-II/2002 pada 19 Agustus 2002 (Ciputra, 2022). Aturan konservasi yang diterapkan di kawasan ini turut memengaruhi pola hidup masyarakat pesisir, termasuk komunitas seperti Suku Bajau.

Masyarakat Suku Bajau yang dulunya bergantung pada laut dengan mencari ikan di terumbu karang kini harus menghadapi perubahan besar akibat dibentuknya kawasan konservasi. Perubahan ini memaksa mereka untuk mencari sumber penghidupan baru sebagai penyesuaian atas kondisi yang semakin terbatas. Situasi ini menjadi sebuah ironi, karena tinggal dan menetap di pesisir sejatinya bukanlah pilihan mereka, melainkan hasil arahan pemerintah. Pemerintah berpendapat bahwa dengan bermukim di daerah pesisir, masyarakat Suku Bajau dapat lebih mudah mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga mengklaim bahwa kehidupan di lautan lepas dapat membahayakan mereka dengan ancaman bencana alam seperti tsunami dan badai (Kaye, 2019).

Dalam sebuah wawancara dengan perwakilan dari Suku Bajau, Melati Kaye mencatat pernyataan dari salah seorang tokoh senior Suku Bajau bernama Abdul Manan. Abdul menceritakan bahwa dahulu para anggota Suku Bajau biasa memukul dasar laut dengan tongkat gogor untuk memanggil ikan, lalu menangkap ikan tersebut hanya untuk kebutuhan makan sebagai cara bertahan hidup. Namun, kini mereka harus menangkap lebih banyak ikan untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Abdul juga mengungkapkan bahwa masyarakat Suku Bajau harus menghadapi pengaruh dari luar dan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Di sisi lain, mereka sering kali merasa kebingungan dan tidak tahu bagaimana cara merespons berbagai perubahan tersebut.

Lebih lanjut, Suku Bajau juga harus menghadapi kenyataan bahwa mereka terjebak di antara dua cara hidup yang berbeda. Kehidupan tradisional mereka yang bergantung pada laut dan praktik budaya lama mulai terganggu dengan tuntutan kehidupan yang lebih mengarah ke daratan. Misalnya, dahulu mereka memiliki metode pengobatan sendiri yang berfokus pada harmoni dengan lingkungan maritim. Namun sekarang, jika ada anggota komunitas yang sakit, mereka harus bergantung pada layanan kesehatan yang berada di daratan (Yeni, 2023). Perubahan ini menggambarkan ketegangan antara tradisi lama dan tuntutan adaptasi dalam menghadapi kebijakan dan dinamika lingkungan yang baru.



---

### **3. Kebijakan yang Harus Diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keberlangsungan Hidup Suku Bajau di Kecamatan Kaledupa: Taman Nasional Wakatobi**

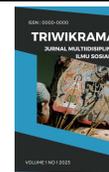
Seorang peneliti berkebangsaan Prancis yang telah mempelajari masyarakat Suku Bajau selama 40 tahun dalam *First International Symposium on Sea Nomads in Southeast Asia* menyatakan bahwa untuk melindungi budaya unik Suku Bajau, dunia luar perlu memahami identitas mereka secara mendalam dan menghargai cara hidup mereka. Sebagai komunitas yang telah hidup di lautan selama ratusan tahun, laut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas mereka, begitu juga dengan cara hidup yang bergantung pada sumber daya kelautan (Dedi, 2024).

Dalam konteks ini, pemaksaan untuk bermukim di wilayah pesisir bukanlah solusi yang tepat, apalagi dengan melarang mereka menangkap ikan yang merupakan satu-satunya cara mereka bertahan hidup. Pendekatan yang lebih bijak dan memahami dinamika hidup Suku Bajau diperlukan untuk memastikan keberlanjutan budaya, cara hidup, dan akses mereka terhadap sumber daya yang selama ini menjadi tumpuan kelangsungan hidup mereka. Para advokat yang pernah menangani penggusuran secara paksa terhadap pemukiman Suku Bajau yang ada di taman nasional Sabah berpendapat bahwa penting adanya dialog dan negosiasi sebelum menentukan kebijakan apa yang harus diambil untuk menjaga kelestarian suku ini (Mp, 2024).

Salah satu langkah yang dianggap efektif untuk melestarikan budaya dan cara hidup masyarakat Suku Bajau adalah dengan memberikan pengakuan resmi kepada mereka sebagai masyarakat adat khusus. Pengakuan ini memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak mereka terlindungi, baik dalam aspek budaya, sosial, maupun akses terhadap ruang laut dan sumber daya alam yang mereka andalkan untuk kelangsungan hidup (Adhuri & Ariando, 2022).

Namun, sayangnya dalam UU No. 1 Tahun 2014, masyarakat Suku Bajau tidak dapat dikategorikan sebagai masyarakat adat karena ruang hidup mereka yang berada di lautan. Hal ini terjadi karena dalam peraturan tersebut, makna wilayah dan teritori masyarakat adat masih berbasis daratan, sehingga Suku Bajau mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum yang sama seperti masyarakat adat lainnya. Situasi ini menunjukkan perlunya penyesuaian kebijakan yang lebih inklusif agar dapat mengakomodasi keberagaman ruang hidup dan budaya masyarakat Suku Bajau yang bergantung pada lingkungan maritim sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka.

Pemerintah dan DPR seharusnya memberikan perhatian yang mendalam terhadap keberlanjutan kehidupan kaum gipsi laut dengan merumuskan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Masyarakat Hukum Adat. RUU ini bisa menjadi jalur penting untuk mengakui keberadaan kaum gipsi laut sebagai kelompok masyarakat adat yang khas, sambil melindungi hak-hak mereka. Selain itu, melalui RUU ini juga dapat dijaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir dengan pendekatan berbasis keterlibatan masyarakat lokal. Dengan pengakuan ini, diharapkan kaum gipsi laut dapat terus mempertahankan budaya dan cara hidup tradisional mereka yang bergantung pada sumber daya laut sambil berperan dalam upaya pelestarian lingkungan pesisir.



Opsi lainnya adalah penerapan skema *Locally Managed Marine Area* (LMMA), yang telah berhasil mencakup 300 komunitas pesisir di Provinsi Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Melalui skema ini, sebanyak 66.400 anggota komunitas memperoleh manfaat dalam bentuk ketersediaan pangan yang lebih banyak dan peningkatan pendapatan, berkat pengelolaan lebih dari 760.800 hektar kawasan seperti terumbu karang, lamun, bakau, dan garis pantai secara lokal. Selain itu, dengan adanya 60 zona larangan tangkap yang diterapkan dalam skema ini, dilakukan upaya pemulihan ekosistem laut yang telah mengalami kerusakan (Norman, 2021). Skema LMMA ini dapat diadopsi oleh pemerintah daerah untuk mendukung masyarakat Suku Bajau yang telah menetap di pesisir pantai Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, agar dapat mengelola sumber daya laut mereka secara berkelanjutan sambil menjaga kelestarian lingkungan.

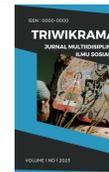
Dengan mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan tersebut, diharapkan pemerintah dapat memastikan keberlangsungan hidup masyarakat Suku Bajau yang bermukim di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. Melalui pengakuan resmi, penerapan skema seperti *Locally Managed Marine Area* (LMMA), serta kebijakan yang berfokus pada perlindungan hak dan ruang hidup mereka, Suku Bajau dapat mempertahankan budaya, cara hidup tradisional, dan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi penopang kelangsungan hidup mereka di tengah perubahan yang terjadi.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Indonesia sebagai negara maritim memiliki tantangan dan peluang dalam mendukung keberlangsungan hidup Suku Bajau di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. Suku Bajau, sebagai komunitas yang bergantung pada sumber daya maritim, menghadapi berbagai hambatan seperti eksploitasi sumber daya alam, perubahan lingkungan, serta kebijakan pemerintah yang berfokus pada program pembangunan dan konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah, seperti intervensi pembangunan permukiman dan pengelolaan kawasan konservasi seperti Taman Nasional Wakatobi, memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan Suku Bajau. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan akses kepada layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, di sisi lain, kebijakan ini memicu resistensi budaya dan mengganggu pola hidup tradisional mereka.

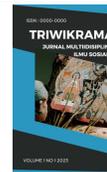
Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan yang berfokus pada inklusifitas, dialog, serta pengakuan terhadap kearifan lokal Suku Bajau sangat penting. Kebijakan yang berkelanjutan harus mempertahankan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengakuan hak-hak mereka sebagai masyarakat adat.

Oleh karena itu, langkah-langkah yang disarankan antara lain pengakuan resmi terhadap Suku Bajau sebagai masyarakat adat, pendekatan yang memperhatikan nilai budaya dan tradisi mereka, serta penyusunan kebijakan yang lebih fleksibel dan berpihak pada kesejahteraan mereka tanpa mengorbankan cara hidup yang mereka jalani selama ini. Dengan pendekatan yang tepat, keberlanjutan hidup Suku Bajau dapat dijaga sambil mempertahankan budaya dan kearifan lokal yang telah ada sejak lama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adhuri, D. S., & Ariando, W. (2022, April 8). *Menjaga 'gipsi laut': kita butuh kebijakan khusus yang berbeda dengan masyarakat adat di daratan*. The Conversation.  
<https://theconversation.com/menjaga-gipsi-laut-kita-butuh-kebijakan-khusus-yang-berbeda-dengan-masyarakat-adat-di-daratan-179851>
- Artanto, Y. K. (2017). Bapongka, Sistem Budaya Suku Bajo dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Pesisir. *Sabda Jurnal Kajian Kebudayaan*, 12(1), 52.  
<https://doi.org/10.14710/sabda.v12i1.15253>
- Ciputra, W. (2022, February 13). Taman Nasional Wakatobi: Sejarah, Ekosistem, dan Tempat Wisata di Dalamnya. *KOMPAS.com*.  
[https://regional.kompas.com/read/2022/02/13/142404678/taman-nasional-wakatobi-sejarah-ekosistem-dan-tempat-wisata-di-dalamnya#google\\_vignette](https://regional.kompas.com/read/2022/02/13/142404678/taman-nasional-wakatobi-sejarah-ekosistem-dan-tempat-wisata-di-dalamnya#google_vignette)
- Clarkson, J. D. (1968). The Sea Nomads: A Study Based on the Literature of the Maritime Boat People of Southeast Asia. *The Journal of Asian Studies*, 27(4), 920–921.  
<https://doi.org/10.2307/2051635>
- Dedi. (2024, December 9). Mengupas Identitas dan Tantangan Komunitas Bajau: Perspektif Peneliti Prancis. *www.NtvNews.ID*. <https://www.ntvnews.id/news/0126651/mengupas-identitas-dan-tantangan-komunitas-bajau-perspektif-peneliti-prancis>
- Humas. (2021, September 23). *Presiden Jokowi: Kerja nyata kokohkan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-kerja-nyata-kokohkan-identitas-indonesia-sebagai-bangsa-maritim/>
- Jeon, K. (2019). The life and culture of the Bajau, Sea Gypsies. *Journal of Ocean & Culture*, 2, 38–57.  
<https://doi.org/10.33522/joc.2019.2.38>
- Kaye, M. (2019, December 19). *Trouble in paradise: Wakatobi's "sea gypsies" adjust to life in a marine park*. Mongabay Environmental News. <https://news.mongabay.com/2015/11/trouble-in-paradise-wakatobis-sea-gypsies-adjust-to-life-in-a-national-park/>
- Koentjaraningrat. (1993). Masyarakat terasing di Indonesia. In *PT Gramedia Pustaka Utama eBooks*.  
<https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA7170195X>
- Kome, E. E., Yusnaldi, Y., Yulianto, B. A., Widodo, P., & Suwarno, P. (2024). Peran pemerintah dalam menjaga kelestarian maritim. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(4), 5. <https://doi.org/10.47134/par.v1i4.3098>
- Mp, R. (2024, June 29). Konflik Suku Bajau Laut dengan pemerintah Sabah, akibat penggusuran rumah yang masuk taman laut - Mirror Pontianak - halaman 2. *Konflik Suku Bajau Laut Dengan Pemerintah Sabah, Akibat Penggusuran Rumah Yang Masuk Taman Laut - Mirror Pontianak - Halaman 2*. <https://www.mirrorpontianak.com/tekno/1264810315/konflik-suku-bajau-laut-dengan-pemerintah-sabah-akibat-penggusuran-rumah-yang-masuk-taman-laut?page=2>
- Norman, A. (2021, October 25). *Indonesia | LMMA Network International*. LMMA Network International. <https://lmmanetwork.org/indonesia/>



---

UU No. 1 Tahun 2014. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38521/uu-no-1-tahun-2014#:~:text=UU%20No.%201%20Tahun%202014,Pulau%20Kecil%20%255BJDIH%20BPK%20RI%255D>

Widagdo, A. B. W. (2014). *Intervensi pemerintah terhadap Suku Bajau melalui pola permukiman studi kasus Desa Sama Bahari*. Universitas Indonesia Library.

<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20387747&lokasi=lokal>

Yeni. (2023, January 9). *Menjaga bajau, menjaga laut, meredam modernitas*. SuaraIndo.id.

<https://www.suaraindo.id/2023/01/menjaga-bajau-menjaga-laut-meredam-modernitas/>